

# PERAN DINAS SOSIAL KOTA BITUNG DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SEBAGAI UPAYA MERINGANKAN KEBUTUHAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN DI MASA PANDEMI COVID-19

Christian Wilman Dokomi

NPP. 27.1001

*Asdaf Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara*

*Program Studi Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat*

Email: christiandokomi31@mail.com

## ABSTRACT

**Problem/Background (GAP):** The author focuses on the problems that arise as a result of the Corona Virus pandemic on the poor, where the role of the government is required to handle the problems of the economic needs of the poor during the pandemic. **Purpose:** This study aims to determine the role of the government in distributing social assistance in dealing with the economic needs of the poor during the pandemic. **Methods:** This study used a qualitative method. Data collection techniques were carried out by conducting interviews, observations and documentation. **Results:** the results obtained by the author in this study are focused on the role of the government in this case the Bitung City social service in dealing with the Corona Virus pandemic, by distributing social assistance to handle the economic needs of the poor during the Covid-19 pandemic with 6 types of assistance. which is distributed. **Conclusion:** The role of social services in the distribution of social assistance has been carried out in accordance with the guidelines issued by the central government or the Ministry of Social Affairs. Although there are still obstacles in the distribution of social assistance, it is recommended to further improve employee performance and also increase supervision to related parties in the distribution. So that the process of distributing social assistance is right on target and can be accepted by the poor in Bitung City.

**Keywords:** Covid-19 Pandemic, Role, Social Service, Social Assistance, Bitung City.

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis berfokus pada permasalahan yang timbul akibat dari pandemi Virus Corona terhadap masyarakat miskin, dimana peran pemerintah dituntut untuk menangani permasalahan kebutuhan ekonomi masyarakat miskin di masa pandemi. **Tujuan:** dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial dalam menangani permasalahan kebutuhan ekonomi masyarakat miskin di masa pandemi. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil dan Temuan:** hasil yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu berfokus pada peran pemerintah dalam hal ini dinas sosial Kota Bitung dalam menangani pandemi Virus Corona ini adalah dengan menyalurkan bantuan sosial untuk penanganan kebutuhan ekonomi masyarakat miskin di masa pandemi Covid-19 dengan 6 jenis bantuan yang disalurkan. **Kesimpulan:** Peran dinas sosial dalam penyaluran bantuan sosial sudah dilakukan sesuai dengan pedoman yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau Kementerian Sosial. Meskipun masih saja terdapat kendala dalam penyaluran bantuan sosial disarankan untuk lebih meningkatkan kinerja pegawai dan juga meningkatkan pengawasan kepada pihak-pihak terkait dalam

penyaluran. Sehingga proses penyaluran bantuan sosial ini tepat sasaran dan boleh diterima oleh masyarakat miskin di Kota Bitung.

**Kata kunci:** Pandemi Covid-19, Peran, Dinas Sosial, Bantuan Sosial, Kota Bitung.

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Seperti di negara-negara lainnya Indonesia juga termasuk negara yang juga merasakan pandemi Covid-19 ini. Virus corona saat ini menjadi perhatian khusus dari pemerintah dikarenakan mengguncang perekonomian masyarakat maupun negara. Pemerintah pusat sampai daerah pun bekerja keras untuk menghentikan penyebaran virus corona ini, dimulai dengan sosialisasi lewat media sosial sampai pada bantuan sosial.

Pada masa ini banyaknya permasalahan yang muncul akibat pandemi Covid-19 yang membuat banyak masyarakat miskin yang terkendala dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 di Kota Bitung, oleh karena itu dibutuhkan peran aktif dari pemerintah Kota Bitung

Masyarakat miskin memiliki pengaruh yang signifikan dalam penambahan jumlah kasus positif Covid-19. Hal ini disebabkan oleh kondisi dari masyarakat miskin tidak sepenuhnya dalam mendapatkan informasi mengenai Covid-19 ini serta akses layanan kesehatan yang terkendala akibat masalah keuangan, kurangnya perhatian yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang mengalami guncangan ekonomi mengakibatkan penambahan angka kemiskinan, hal ini dikarenakan kebijakan-kebijakan di masa pandemi Covid-19 ini yang mewajibkan masyarakat bekerja dari rumah serta pemberlakuannya pembatasan kegiatan masyarakat yang membuat para pedagang serta pekerja swasta lainnya mengalami kesusahan ekonomi dengan demikian menambah jumlah angka kemiskinan di Kota Bitung.

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Berdasarkan dari undang-undang tersebut maka kesejahteraan sosial memiliki kriteria dimana kondisi kebutuhan warga negara harus terpenuhi maka baru bisa dikatakan sejahtera. Dengan demikian pemerintah memiliki tanggungjawab terhadap masyarakat agar tetap sejahtera.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam membahas peran dinas sosial Kota Bitung dalam penyaluran bantuan sosial sebagai upaya meringankan kebutuhan ekonomi masyarakat miskin di masa pandemi Covid-19 maka judul penelitian yang penulis ambil adalah “Peran Dinas Sosial Kota Bitung Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Meringankan Kebutuhan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Masa Pandemi Covid-19”

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan pandemi Covid-19. Faktor ekonomi merupakan salah satunya. Cukup banyak masyarakat di Kota Bitung yang mengalami kendala dalam mencari nafkah guna untuk memenuhi kebutuhan makan minum, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Dimana pandemi Covid-19 ini mengharuskan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang juga merugikan perekonomian masyarakat maupun negara yaitu salah satunya adalah PPKM yang membuat banyak sekali lapangan pekerjaan yang tutup akibat kebijakan tersebut.

Terdapat kecurangan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan hal ini bisa dibuktikan dengan adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri sosial yang menerima suap bantuan sosial. Kemudian ada juga kasus pungli (pungutan liar) bansos di daerah depok khususnya di kelurahan Beji

berdasarkan berita dari kompas.com menjelaskan bahwa pungli tersebut dilakukan oleh ketua RW dengan memotong uang bansos sebesar Rp. 50.000 untuk biaya bensin serta perbaikan ambulance. Adapun masalah yang dipicu melalui media sosial facebook menjelaskan bahwa data penerima bantuan terdampak virus Corona di Bitung diduga adanya asumsi liar terkait penyaluran sembako oleh pemkot Bitung. Oleh karena itu dibutuhkan peranan dinas sosial dalam penyaluran bansos agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pandemi Covid-19 dan juga peran dinas sosial. Penelitian oleh Dito Aditia Darma Nasution, Erlina dan Iskandar Muda pada tahun 2020 dengan judul Dampak Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah dampak pandemi virus corona menyebabkan rendahnya keaktifan investor bagi pasar sehingga akhirnya pasar cenderung ke arah yang negatif, relevansi dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terdapat arah penelitian yang sama yaitu mengenai dampak pandemi virus corona terhadap masyarakat.

Penelitian oleh Aldi Sajjan dengan judul Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Di Kota Mataram tahun 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu penelitian ini mempunyai hasil yang menyatakan bahwa keputusan dalam Implementasi terhadap program Bantuan Sosial Tunai Kota Mataram standarnya dan sasarannya bisa dikategorikan efektif. Dilihat dari sudut pandang prosedur program tersebut sudah terlaksana berdasarkan sistem, sekalipun dilihat dari jumlah dana bantuan itu belum mampu memenuhi semua kebutuhan masyarakat dalam sebulan. Relevansi yang ada pada penelitian ini adalah Terdapat metode yang sama dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif berkaitan dengan implementasi program bantuan sosial tunai

Penelitian oleh Zhalsha Ramadhani Nur Hidayat dengan judul Pengukuran Kinerja Program Bantuan Sosial Covid-19 Dengan Menggunakan Indikator Value For Money Pada Pemerintah Daerah Kota Makassar tahun 2021. Metode yang digunakan yaitu Metode penelitian deskriptif beserta metode analisis campuran. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah menunjukkan kinerja program Bansos Covid-19 mampu menerapkan konsep ekonomi dan efisiensi namun tidak mampu mengoptimalkan efektivitas kinerjanya. Selain itu, Pemerintah daerah Kota Makassar belum bertindak transparan, akuntabel, dan mementingkan kepentingan publik, yang dimana berdampak pada kinerjanya yang kurang baik. Relevansinya yaitu Terdapat kesamaan beberapa variabel yang peneliti angkat yaitu terhadap bantuan sosial.

Penelitian oleh Nugrahana Fitria Ruhyana, Hadi Ferdiansyah dengan judul Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Masa Pandemi Covid-19 tahun 2020. Metode yang digunakan adalah Metode kualitatif deskriptif, hasil dari penelitian ini adalah mengenai persepsi masyarakat terhadap pemberian label rumah tangga miskin mengungkapkan bahwa masyarakat memberikan persepsi positif dan negative. Berdasarkan hasil pernyataan penelitian di atas, kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk memberikan bela-belan pada rumah tangga penerima bantuan merupakan menjadi pilihan tepat. Relevansinya yaitu berkaitan dengan arah sasaran dalam pemberian bantuan sosial di masa pandemi Covid-19.

Penelitian oleh Chofifah Nur Azizi dengan judul Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pengelolaan Bantuan Sosial Tunai di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ( Studi Kasus Desa Muntang Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga ) Tahun 2021, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan BST diatur berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/Huk/2020 Tentang Pembagian

Bantuan Sosial Tunai dan Bantuan Sembako. Dalam menghadapi situasi dan kondisi di masyarakat yang dihadapkan dengan ketidakpastian, kepala desa berusaha untuk bersifat responsif dan tanggung jawab. Dan relevansi dari penelitian ini mengenai pengolahan bantuan sosial yang memiliki kesamaan dalam menggunakan metode penelitian, yaitu metode kualitatif.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni peran dinas sosial Kota Bitung dalam penyaluran bantuan sosial sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat miskin di masa pandemi Covid-19. Dan peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara serta dokumentasi di lokasi Kota Bitung. Dengan berfokus pada jenis bantuan sosial, dan peran dinas sosial dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat Kota Bitung. Dapat di lihat juga penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan dalam hal konteks hasil penelitian dan pembahasan yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran dinas sosial Kota Bitung dalam menyalurkan bantuan sosial sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat miskin Kota Bitung di masa pandemi Covid-19.

## **II. METODE**

Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan metode penelitian kualitatif. Metode Penelitian kualitatif menurut sugyono (2013) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Berdasarkan pengertian di atas penulis memutuskan untuk menggunakan metode penelitian kualitatif karena sesuai dengan penelitian yang akan penulis teliti.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Covid-19 di Kota Bitung**

Peran Dinas Sosial saat ini merupakan salah satu hal yang paling dibutuhkan oleh negara Indonesia, dikarenakan pandemi Covid-19 yang masih saja terus-menerus terjadi di Indonesia terkhususnya Kota Bitung, dimana pandemi Covid-19 ini masih dirasakan oleh masyarakat Kota Bitung, oleh karena itu pentingnya peran dinas sosial untuk membantu masyarakat lewat kebijakan pemerintah pusat dalam menyalurkan bantuan sosial serta mengawasi proses penyaluran bantuan tersebut kepada masyarakat. secara garis besar peran dinas sosial dalam penyaluran bantuan sosial Covid-19 antara lain membantu mendata masyarakat yang perlu diberikan bantuan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku, setelah mendata peran dinas sosial juga yang melakukan penyaluran bantuan tersebut berdasarkan data yang ada, serta mengawasi proses penyaluran bantuan sehingga dapat mencegah kecurangan yang dilakukan Ketika masyarakat melakukan pengambilan bantuan, pengawasan ini biasanya dilakukan antara lain penyaluran bantuan melalui e-warong seperti bantuan BPNT PPKM

### **Kebijakan Yang Diberlakukan Pemerintah Kota Bitung Di Masa Pandemi Covid-19 Serta Jenis Bantuan Sosial yang Diberikan.**

Pandemi Covid-19 sampai saat ini masih terus dialami oleh masyarakat Indonesia, khususnya Kota Bitung juga merasakan pandemi ini, akibat dari pandemi Covid-19 masyarakat Kota Bitung merasakan dampak sosial maupun ekonomi, dampak sosial dari pandemi Covid-19 ini yaitu menurunkan nilai-nilai kebudayaan yang sudah tertanamkan di masyarakat Kota Bitung seperti berjabat tangan, pesta, perkumpulan atau arisan dan sekolah yang sekarang ini melaksanakan daring atau sekolah online. Hal ini membuat banyak sekali kebijakan yang di berlakukan oleh pemerintah Kota Bitung, selayaknya kebijakan-kebijakan pada umumnya pemerintah Kota Bitung menerapkan kebijakan mulai dari 3M (Menjaga Jarak, Mencuci Tangan, Memakai Masker) sampai kepada PPKM level 4 yang membuat masyarakat Kota Bitung mengalami penurunan ekonomi atau pendapatan, akibat dari PPKM level 4 masyarakat Kota Bitung banyak yang kehilangan pekerjaannya oleh karena itu pemerintah memberikan beberapa jenis bantuan sosial di masa pandemi Covid-19 ini diantaranya:

1. Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)

Bantuan sosial Program Keluarga Harapan atau biasa disebut dengan PKH merupakan program dari pemerintah untuk meringankan kebutuhan ekonomi masyarakat miskin sejak tahun 2007. Bantuan sosial ini juga tetap berlaku disaat masa pandemi Covid-19 terlebih kusus di Kota Bitung, berdasarkan hasil penelitian yang lakukan oleh peneliti terdapat 6.532 penerima bantuan sosial PKH sampai saat ini, tetapi angka tersebut masih relatif dikarenakan adanya penambahan jumlah masyarakat miskin ataupun graduasi yang terjadi di dalam masyarakat. Graduasi merupakan penurunan angka dikarenakan kenaikan ekonomi masyarakat miskin menjadi masyarakat mampu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Demitryus Langgori, SH “Selaku Seksi Jaminan Sosial Keluarga mengatakan bahwa graduasi dibagi 2 antara lain, graduasi atas keinginan sendiri, dan graduasi atas musyawarah yang dilakukan oleh lurah serta perangkat kelurahan didampingi oleh pegawai dinas sosial”.

Tabel 1

Kategori	Indeks/Tahun (Rp)	Indeks/ 3 bulan (Rp)
Ibu Hamil	3.000.000	750.000
Anak Usia Dini	3.000.000	750.000
Anak Sekolah SD	900.000	225.000
Anak Sekolah SMP	1.500.000	375.000
Anak Sekolah SMA	2.000.000	500.000
Lanjut Usia 70+	2.400.000	600.000
Disabilitas Berat	2.400.000	600.000

Sumber: Dokumen Dinas Sosial Kota Bitung, 2020

Data di atas merupakan skema bantuan yang diberikan mulai dari kategori ibu hamil dan anak usia dini dengan indeks 3 juta tiap tahun atau indeks 750 ribu tiap 3 bulan, untuk anak sekolah SD mendapatkan bantuan 900 ribu tiap tahun atau 225 ribu tiap 3 bulan, untuk anak sekolah SMP 1,5 juta tiap tahun atau 375 ribu tiap 3 bulan, sedangkan anak sekolah SMA mendapatkan bantuan dengan

indeks 2 juta tiap tahun atau 500 ribu tiap 3 bulan, untuk lanjut usia dan disabilitas berat indeks bantuan mereka sama yaitu 2,4 juta tiap tahun atau 600 ribu tiap 3 bulan.

Untuk penerima bantuan PKH, maka masyarakat tersebut harus terdaftar di DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial), prosedur untuk tergabung dalam DTKS yaitu dengan mengadakan rapat atau musyawarah kelurahan yang terdiri dari kepala kelurahan atau biasa disebut lurah dan perangkat kelurahan yang diantaranya RT/RW, kepala lingkungan dan perwakilan masyarakat serta didampingi oleh pegawai dinas sosial untuk menentukan masyarakat yang layak untuk terdaftar di DTKS untuk menerima bantuan sosial.

## 2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) PPKM

Bantuan Pangan Non Tunai atau biasa dikenal dengan BPNT merupakan bantuan sosial yang diberikan pemerintah sejak tahun 2020 dimana awal mula pandemi Covid-19 yang membuat pemerintah Indonesia berupaya sekuat tenaga untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dimana pada saat itu mengalami penurunan perekonomian masyarakat karena adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah menyalurkan bantuan sosial BPNT yang dapat digunakan oleh masyarakat terdampak pandemi Covid-19 atau keluarga penerima manfaat (KPM) dimana BPNT tersebut bisa digunakan untuk membelit jenis bahan yang sudah ditentukan yaitu sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati, maupun vitamin dan mineral, pembelian tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19 di e-warong atau tempat usaha yang dikelola dan dimiliki fakir miskin penerima program bantuan sosial. Untuk data total penerima BPNT PPKM saat ini belum ada dikarenakan masih pada tahap penyaluran.

Untuk penerima bantuan BPNT PPKM yaitu hampir menyeluruh kepada masyarakat diluar dari PNS atau anggota TNI dan POLRI, penerima bantuan tersebut antara lain masyarakat yang telah menerima undangan pemberitahuan BSP (bantuan sosial pangan) melalui perangkat kelurahan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perlindungan sosial korban Bencana sosial menjelaskan bahwa untuk syarat mendapatkan bantuan sosial salah satunya yaitu telah melakukan vaksin tahap 1 maupun tahap 2 ataupun surat keterangan bagi masyarakat yang memiliki gangguan Kesehatan sehingga tidak dapat melakukan vaksin, wajib memiliki KK dan E-KTP sebagai syarat utama dalam pembuatan kartu keluarga sejahtera (KKS) yang di buat oleh bank daerah, untuk Kota bitung yaitu bank Sulut-go. Kemudian mengisih formulir pembukaan rekening bank sesuai dengan bank yang akan menyalurkan bantuan.

Dalam pengambilan bantuan sosial BPNT. Pengambilan bantuan sosial ini, penerima harus membawa kartu keluarga asli dan E-KTP asli, surat vaksin ataupun surat keterangan, datang ke lokasi penyaluran KKS, setelah itu jangan lupa untuk memastikan nama dan NIK sudah sesuai. Setelah KKS sudah diterima bisa langsung menuju ke E-warong untuk mengambil bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 3. Bantuan Sosial Tunai (BST)

Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak COVID-19. Bantuan sosial tunai merupakan program pemerintah yang berasal dari kementerian sosial Republik Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang perlindungan dan jaminan sosial mengatakan bahwa Bantuan Sosial Tunai diberikan pada jangka waktu mulai dari bulan Mei 2020 sampai bulan April 2021 atau setahun, dengan bantuan uang tunai sebesar Rp.600.000 per keluarga dan proses pengambilan bantuan uang tunai tersebut melalui kantor pos dengan jumlah penerima bantuan uang tunai ini sebesar 2500 keluarga yang ada di Kota Bitung. Bantuan Sosial Tunai ini diberikan atas dasar pertimbangan oleh pemerintah pusat dikarenakan banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19 ini. dengan adanya bantuan sosial tunai ini diharapkan dapat membantu masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi di masa pandemi ini.

#### 4. Sembako

Program Sembako merupakan pengembangan dari program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yang mulai dilaksanakan oleh Pemerintah sejak tahun 2020. Jenis bahan pangan yang dapat dibeli Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yaitu sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati maupun vitamin dan mineral. Perluasan jenis komoditas bahan pangan yang dapat dibeli KPM di e-warong merupakan upaya dari Pemerintah untuk memberikan akses KPM terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi yang beragam dan sebagai upaya untuk mencegah stunting. Program Sembako diharapkan dapat memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam menentukan jenis, kualitas, harga dan tempat membeli bahan pangan. Untuk saat ini total jumlah penerima bantuan sembako di Kota Bitung adalah 2894 keluarga, angka tersebut masih relatif karena bantuan tersebut masih terus berlanjut.

#### 5. Bantuan Sosial Lansia dan Penyandang Disabilitas

Bantuan Sosial untuk lansia dan penyandang disabilitas merupakan program pemerintah daerah yang diberikan juga di masa pandemi Covid-19, jadi tentunya program bantuan sosial ini berasal dari APBD. Berdasarkan hasil wawancara terhadap pelaksana tugas kepala dinas sosial ibu Leddy Ambat, S.STP mengatakan bahwa program bantuan sosial ini diberikan khusus kepada lansia dan penyandang disabilitas, total jumlah penerima bantuan ini 15.454 orang, untuk mekanisme penyaluran bantuan sosial ini melalui virtual account, jadi untuk pengambilan bantuan sosial ini para penerima bantuan langsung menuju ke bank dan langsung ke teller bank nya, untuk bank penyaluran bantuan sosial ini melalui bank Sulut-go atau bank daerah dikarenakan program bantuan sosial ini berasal dari APBD. Bantuan sosial ini diharapkan membantu masyarakat Kota bitung khususnya kepada lansia dan penyandang disabilitas dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di masa pandemic.

#### 6. Bantuan Sembako Percepatan Vaksinisasi Tahap 1 Bagi Usia 6-16 Tahun

Program bantuan sembako percepatan vaksinisasi tahap 1 bagi usia 6 - 16 tahun merupakan program bantuan yang di berikan langsung dari dinas sosial provinsi kepada dinas sosial Kota Bitung untuk dibagikan kepada masyarakat Kota Bitung yang melaksanakan vaksin tahap 1 bagi masyarakat yang berusia 6-16 tahun, berdasarkan arahan dari kepala dinas sosial Kota Bitung ibu Leddy Ambat, S,STP mengarahkan untuk efektifnya pemberian bantuan sembako ini agar dibagikan ke beberapa sekolah yang melaksanakan vaksinisasi tahap 1.

Bantuan sembako ini berasal dari APBN, dan jumlah bantuan yang di berikan kepada Kota Bitung berupa 1000 paket sembako dan ditambah lagi oleh dinas provinsi sebesar 500 paket sembako, yang di dalam nya terdiri dari beras 5 kg, gula 1 kg dan minyak kelapa 2 liter. Penyaluran bantuan sembako percepatan vaksinisasi tahap 1 usia 6 -16 tahun telah terselenggarakan di beberapa kelurahan. Dengan adanya program bantuan sembako percepatan vaksinisasi ini maka pemerintah Kota Bitung sangat mengharapkan peningkatan jumlah masyarakat yang vaksin sehingga masyarakat mampu bertahan hidup ditengah pandemi Covid-19 saat ini.

### **3.2. Hambatan Yang Dialami Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Masa Pandemi Covid-19**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ada beberapa hambatan yang dialami oleh dinas sosial Kota Bitung dalam menyalurkan bantuan sosial di masa pandemi Covid-19, diantaranya adalah:

#### 1. Perbedaan antara NIK atau nama di KTP dengan kartu Keluarga Sejahtera

Berdasarkan hasil observasi banyak sekali kasus seperti ini terjadi di masyarakat Kota Bitung, karena dapat dilihat dari hasil observasi hampir setiap hari keluhan yang diterima oleh dinas sosial Kota Bitung adalah kasus seperti ini, hal ini merupakan salah satu penghambat bagi masyarakat yang akan menerima bantuan, kasus seperti ini terjadi karena disaat pengambilan data, para calon penerima program bantuan tidak teliti dalam mengisi pendataan untuk mendaftar atau kesalahan disaat mengisi

data, hasil dari observasi penulis, penulis menemukan bahwa adanya kelalaian dari pihak penerima dikarenakan lambatnya laporan disaat pengambilan bantuan, tidak langsung melapor padahal sudah ada dari KPM yang menerima bantuan tetapi yang lain hanya menunggu giliran, tetapi hal seperti ini juga tidak sepenuhnya kesalahan dari pihak calon penerima ada juga kelalaian dari para petugas dan pendamping dinas sosial di tiap-tiap wilayah yang kurang memperhatikan dan memberikan pemahaman atau sosialisasi kepada masyarakat yang ada dibagian wilayahnya, hal ini dapat disimpulkan karena masih banyak kasus seperti ini yang terjadi di masyarakat Kota Bitung.

## 2. Kerumunan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala dinas sosial Kota Bitung menjelaskan bahwa salah satu faktor penghambat yang paling berat dihadapi oleh dinas sosial adalah kerumunan, karena sudah diketahui bersama bahwa bantuan sosial ini juga salah satu bentuk atau bagian dari penanganan pandemi Covid-19, akan tetapi dengan masalah kerumunan tersebut maka hanya akan memperbesar pandemi Covid-19, kerumunan ini terjadi diakibatkan seperti pembagian bantuan sosial kepada lansia dan penyandang disabilitas, dan juga seperti pembagian sembako lainnya dikarenakan bank atau agen yang tersedia hanya beberapa tempat saja, maka saat pengambilan bantuan di cabang bank Sulut-go girian dan bitung terjadi kerumunan dikarenakan tempat untuk mengantri sangat terbatas sehingga hal seperti ini dapat terjadi.

## 3. Ketidakesesuaian Data Yang Ada Di Dinas Dengan Data Yang Ada Di Lapangan.

Ketidakesesuaian data yang ada di dinas dengan data yang ada di lapangan terjadi disaat pembagian bantuan sosial sembako percepatan vaksinasi tahap 1 hal ini dikarenakan karena beberapa faktor yang pertama, adanya pihak-pihak yang mau mengambil keuntungan dengan ikut mengantri dalam pembagian bantuan sembako meskipun tidak terdaftar dari yang akan menerima sembako, yang kedua dari pihak dinas sosial yang tidak mendapatkan data secara nyata atau kesalahan komunikasi antara pihak kelurahan dengan dinas sosial, yang ketiga adapun masyarakat yang tidak sesuai dengan kriteria misalkan ada yang belum melaksanakan vaksin tapi ikut dalam mengantri untuk mendapatkan bantuan, memang bantuan sembako ini untuk masyarakat, akan tetapi dari tim penyaluran juga membutuhkan pertanggungjawaban sehingga, masyarakat-masyarakat tersebut yang tidak sesuai dengan kriteria tidak dapat menerima bantuan tersebut.

## 4. Adanya Kecurangan Agen Bank Dalam Penyaluran Bantuan melalui e-warong.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis melalui wawancara, penulis menemukan bahwa adanya kasus kecurangan dari agen bank atau para pedagang yang ditunjuk menjadi e-warong yang melakukan kecurangan diantaranya seperti harga yang ada di e-warong tersebut tidak sesuai dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah sehingga meraut keuntungan yang besar terhadap program bantuan ini, ada juga kecurangan agen yang sengaja mengumpulkan kartu rekening bagi para penerima bantuan kemudian melakukan tindakan secara sengaja dengan menentukan pembelajaran bagi para penerima, kasus seperti ini sudah melanggar aturan atau syarat yang telah disepakati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat, penulis menyimpulkan dari kelima informan yang sudah penulis tentukan dan sudah penulis wawancarai mengatakan bahwa bantuan sosial sudah diterima oleh mereka akan tetapi masih ada masyarakat lain yang mengalami kendala-kendala dalam penyaluran bahkan terdapat kericuhan saat pengambilan bantuan karena kendala-kendala yang telah dipaparkan oleh penulis sebelumnya, hal tersebut dipicu karena masyarakat sudah lama mengantri akan tetapi saat gilirannya tidak dapat mengambil bantuan tersebut karena kesalahan data administrasi.

### 3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Penyaluran bantuan sosial di Kota Bitung yaitu berdampak pada pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat miskin tentunya hal ini cukup untuk memenuhi segala kebutuhan ekonomi,



dimana masyarakat yang kehilangan pekerjaannya diantara lain para pedagang dan juga karyawan yang merasakan dampak dari pandemi harus mencari pekerjaan lain yang sejalan sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bitung meskipun kebijakan tersebut juga merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang diterapkan di Kota Bitung. Untuk menangani masalah pandemi ini tentunya dalam konteks pemenuhan kebutuhan sehari-hari pemerintah mengeluarkan beberapa jenis bantuan untuk penanganan masalah kebutuhan tersebut, diantaranya ada 6 jenis bantuan yang sudah dijelaskan di atas. Pemerintah mengharapkan dengan bantuan sosial yang diberikan mampu menangani permasalahan kebutuhan ekonomi masyarakat miskin di Kota Bitung. Temuan yang di dapati saat penelitian ada beberapa faktor yang membuat penyaluran bantuan tersebut tidak berjalan dengan baik maka dari penelitian ini penulis mencari dan menggali apa saja yang dilakukan oleh dinas sosial dalam penyaluran bantuan sosial dengan hal ini bagaimana peran dari pemerintah agar penyaluran bantuan sosial dapat berjalan dengan baik.

#### IV. KESIMPULAN

Secara garis besar peran dinas sosial dalam penyaluran bantuan sosial Covid-19 antara lain membantu mendata masyarakat yang perlu diberikan bantuan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Setelah mendata, peran dinas sosial juga yang melakukan penyaluran bantuan tersebut berdasarkan data yang ada, serta juga mengawasi proses penyaluran bantuan sehingga dapat mencegah kecurangan yang dilakukan saat masyarakat akan mengambil bantuan, pengawasan ini biasanya dilakukan antara lain penyaluran bantuan melalui e-warong seperti bantuan BPNT PPKM. Pandemi Covid-19 sampai saat ini masih terus dialami oleh masyarakat Indonesia khususnya Kota Bitung pandemi Covid-19 ini membuat banyak sekali kebijakan yang di berlakukan oleh pemerintah Kota Bitung, selayaknya kebijakan-kebijakan pada umumnya pemerintah Kota Bitung menerapkan kebijakan mulai dari 3M (Menjaga Jarak, Mencuci Tangan, Memakai Masker) sampai kepada PPKM level 4 yang membuat masyarakat Kota Bitung mengalami penurunan ekonomi atau pendapatan, akibat dari PPKM level 4 masyarakat Kota Bitung banyak yang kehilangan pekerjaannya oleh karena itu pemerintah memberikan beberapa jenis program bantuan sosial di masa pandemi Covid-19 ini diantaranya

1. Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan
2. BPNT PPKM
3. Bantuan Sosial Tunai
4. Sembako
5. Bantuan Sosial Lansia dan Penyandang Disabilitas
6. Bantuan Sembako Percepatan Vaksinisasi Tahap 1 Bagi Usia 6-16 Tahun

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan peran dinas sosial Kota Bitung dalam penyaluran bantuan sosial sebagai upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat miskin di masa pandemic Covid-19

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Bitung beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Hardani dkk. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Moleong, L. (2007). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda.
- Soekanto, Soerjono. 2017. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press.
- Soejono Soekanto, B. S. (2019). Sosiologi Suatu Pengantar-Ed. Revisi. Depok: Rajawali Pers
- Sugyono. (2013). Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif. Bandung: ALFABETA, CV.
- Dito Aditia Darma Nasution, E. d. (2020). Dampak pandemi Covid 19 Terhadap Perekonomian Indonesia. Jurnal Benefita 5(2) Juli 2020 (212-224) .
- Livana PH, R. H. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Desa. Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences.
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. BASKARA: Journal of Business and Entrepreneurship.
- Azizi, C. N. (2021). Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pengelolaan Bantuan Sosial Tunai di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ( Studi Kasus Desa Muntang Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga). Skripsi.
- Hidayat, Z. R. (2021). Pengukuran Kinerja Pogram Bantuan Sosial Covid-19 Dengan Menggunakan Indikator Value For Money. Diakses dari <https://eprints.umm.ac.id/74847/>.
- Sajian, A. (2021). Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST). Skripsi.
- Nugrahana Fitria Ruhyana, H. F. (2020). Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang Dalam penyaluran Bantuan Sosial.Skripsi
- Wati. Hikmah. 2016. Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan.Skripsi..
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 12 dan 15 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 pasal 3 Tentang Penanganan Fakir Miskin
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 3 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi Dan Penugasan Tugas Pembantuan Kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi Dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020
- Nasional, K. P. (2014). Perlindungan Sosial Di Indonesia. Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 24 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Pasal 4 Tentang Percepatan Penanganan Coroon Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah
- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif Dan Aman Covid-19 Di Provinsi Sulawesi Utara
- <https://bitungkota.bps.go.id/publikasi.html>. Statistik Daerah Kota Bitung 2020. Senin, 6 september 2021